

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan telah menjadi elemen kunci dalam sistem pembayaran yang berfungsi menyalurkan dana ke masyarakat untuk mendukung kegiatan produktif, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu lembaga keuangan atau perbankan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produktif masyarakat. Di Indonesia, sektor perbankan syariah dan konvensional telah menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan keuangan bagi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua sektor ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat, mencerminkan dinamika pasar keuangan yang terus berkembang dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip agama dan konvensional (Jubilee et al., 2021).

Dalam praktiknya, ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dalam hal prinsip operasional, produk dan layanan yang ditawarkan, serta struktur keuangan. Bank syariah menjalankan operasinya dengan mengikuti prinsip syariah Islam, yang melarang spekulasi, riba (pengenaan bunga), dan segala bentuk transaksi yang bertentangan dengan etika Islam. Prinsip utama bank syariah adalah prinsip bagi hasil (mudharabah), yang berarti bank berbagi keuntungan dan risiko dengan nasabah. Bank syariah juga menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan



uai dengan prinsip syariah, seperti tabungan, pembiayaan, investasi, dan Keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial adalah prinsip di balik i.

Struktur keuangan bank syariah lebih terpusat pada pembiayaan dan investasi yang berbasis pada prinsip syariah, seperti pembiayaan musyarakah (kerjasama) dan mudharabah (bagi hasil). Bank syariah juga tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perjudian dan alkohol. Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi konvensional dan hukum pasar bebas. Bank konvensional mengenakan bunga atas pinjaman dan memberikan bunga atas simpanan, serta terlibat dalam transaksi dan investasi konvensional. Bank konvensional menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang umumnya berorientasi pada keuntungan, seperti pinjaman, tabungan, investasi, dan asuransi. Produk-produk ini didesain untuk mencapai profitabilitas dan mengikuti kebutuhan pasar konvensional. Struktur keuangan bank konvensional cenderung lebih terdiversifikasi, termasuk dalam produk-produk investasi dan transaksi keuangan yang kompleks.

Pertumbuhan sektor perbankan syariah dan konvensional di Indonesia mencakup beberapa aspek, seperti jumlah bank, aset, dan pangsa pasar masing-masing sektor. Menurut informasi yang baru dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai data Statistik Perbankan Indonesia, terjadi penurunan jumlah kantor bank umum di Indonesia dari 25.377 unit pada Desember 2022 menjadi 24.280 unit pada November 2023. Artinya, terjadi penurunan sebanyak 1.097 unit kantor bank selama tahun tersebut. Meskipun demikian, jumlah bank umum yang beroperasi hanya mengalami penurunan satu bank dari 106 bank pada Desember 2022 menjadi 105 bank pada November 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023a).



Data juga didistribusikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah tahun 2023 bahwa terjadi penurunan jumlah kantor bank umum Syariah di Indonesia dari 2.007 unit pada Desember 2022 menjadi 1.956 unit pada November 2023. Artinya, terjadi penurunan sebanyak 51 unit kantor bank selama tahun tersebut. Meskipun demikian, jumlah bank umum Syariah yang beroperasi tetap yaitu 13 bank pada November 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023b). Dalam pada itu, pertumbuhan jumlah asset perbankan konvensional pada kisaran 5,08% Year on Year (YoY) dengan total asset Rp11.427.957 (dalam miliar) pada November 2023. Adapun pertumbuhan jumlah asset bank umum Syariah pada kisaran 10,09% YoY dengan total asset Rp553.296 (dalam miliar).

Total aset perbankan seringkali dianggap sebagai indikator dari skala operasi suatu bank. Semakin besar total aset sebuah bank, semakin kompleks operasinya, dan semakin besar pula tekanan yang dihadapi manajemen untuk mencapai target laba yang ditetapkan. Dalam skenario seperti ini, manajemen laba dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola ekspektasi pemangku kepentingan dan memenuhi target laba yang telah ditetapkan.

Bank-bank dengan total aset yang besar cenderung lebih terpapar pada regulasi yang ketat dan pengawasan yang lebih intensif. Regulator dan pihak pengawas memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan kestabilan dan kesehatan keuangan bank-bank besar ini. Dalam hal ini, manajemen laba dapat menjadi respons

-bank tersebut untuk menghindari pelanggaran aturan, mengelola risiko, dan ahankan citra yang baik di mata pemangku kepentingan.



Bank-bank dengan total aset yang besar sering memiliki struktur keuangan yang lebih kompleks, termasuk portofolio investasi yang luas, keterlibatan dalam pasar keuangan global, dan keragaman produk dan layanan. Kompleksitas ini dapat memberikan kesempatan bagi praktik manajemen laba, terutama dalam hal pemilihan metode akuntansi, penilaian aset, atau pengelolaan cadangan kerugian kredit.

Ketika manajemen suatu perusahaan menyusun laporan keuangan dengan cara yang dapat mempengaruhi cara pemangku kepentingan melihat kinerja keuangan perusahaan, mereka menyebutnya manajemen laba. Manajemen laba dapat menggunakan berbagai strategi dan teknik untuk membuat laporan keuangan terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. (Shahzad et al., 2023). Di Indonesia, sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang terpengaruh secara signifikan oleh praktik manajemen laba. Pertanyaannya, apakah praktik manajemen laba ditemukan pada perbankan syariah.

Konsep manajemen laba mengacu pada upaya manajemen perusahaan untuk mengubah keuntungan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Tujuan utama praktik ini adalah untuk memberi pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, regulator, dan pihak terkait lainnya, pemahaman yang lebih baik tentang kinerja perusahaan. (Chatterjee & Rakshit, 2023)

Penelitian yang dilakukan oleh (Fitri & Hakim, 2021) menemukan bahwa komite audit dan ukuran perusahaan memiliki dampak negatif, tetapi kepemilikan modal menguntungkan manajemen laba. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa manajemen laba tidak dipengaruhi oleh profitabilitas. Perusahaan mengurangi manajemen laba dengan membentuk tim audit yang lebih besar



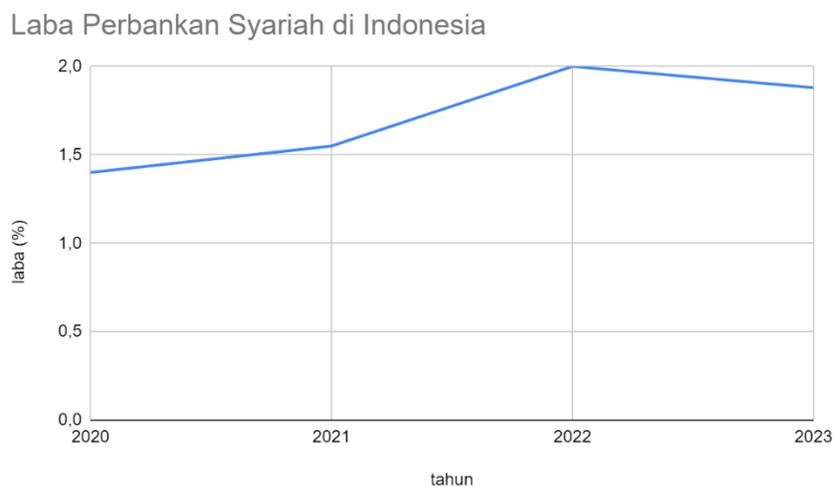
dan meningkatkan kualitas pemantauan. Pemerintah diharapkan dapat membantu investor institusi bekerja dengan lebih baik dalam hal pengawasan daripada hanya berfokus pada keuntungan. Tim audit bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan secara independen, melakukan penilaian terhadap praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen, termasuk apakah ada tanda-tanda manipulasi atau manajemen laba yang tidak etis. Dengan memeriksa laporan keuangan dan proses bisnis perusahaan secara independen, tim audit memainkan peran penting dalam mencegah dan menemukan praktik manajemen laba. Dengan melakukan tugas mereka dengan baik, tim audit membantu memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan perusahaan akurat dan dapat diandalkan.

Manajemen laba berperan penting dalam mempengaruhi persepsi kinerja suatu perusahaan oleh para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, regulator, dan masyarakat umum. Di industri perbankan, laporan keuangan yang menunjukkan kinerja bisnis positif meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung pertumbuhan bisnis dan citra perusahaan. Bank seringkali berada dalam tekanan untuk memenuhi target keuntungan yang ditetapkan oleh manajemen, pemegang saham, dan regulator. Manajemen laba dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola ekspektasi pemangku kepentingan dan mencapai tujuan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam beberapa kasus, praktik manajemen laba dapat membantu bank menghindari pelanggaran peraturan atau mengelola risiko yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan keuangan.



Perkembangan laba perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren yang signifikan dan mencerminkan berbagai dinamika yang terjadi dalam industri keuangan berbasis syariah selama periode tersebut. Berikut perkembangan laba perbankan syariah di Indonesia pada Tahun 2020 hingga 2023:

Gambar 1.1 Perkembangan Laba Perbankan Syariah



Sumber: Data diolah 2024

Praktik manajemen laba dapat mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman dan investasi bank. Laporan keuangan yang menunjukkan kinerja usaha yang lebih baik dapat meningkatkan akses bank terhadap permodalan dan sumber pendanaan serta memperkuat posisi tawar dalam negosiasi dengan pihak lain. Praktik manajemen laba juga dapat mempengaruhi persepsi regulator dan pengawas terhadap kesehatan dan kepatuhan keuangan suatu bank. Jika suatu perusahaan

gresif dalam mengelola pendapatannya, hal ini dapat menimbulkan an dan meningkatkan tingkat pengawasan peraturan (Wahyu & Budiarto,



Dalam kasus manajemen laba Bank Bukopin, OJK menemukan bahwa ada kesalahan dalam laporan keuangan yang diulang, yang menunjukkan bahwa laba bersih yang diubah pada tahun 2016 sebesar Rp 1,08 triliun telah diubah. Ada temuan yang menunjukkan bahwa ada manipulasi dalam jumlah laba bersih Bank Bukopin sebesar Rp 1,08 triliun. Setelah perbaikan, laba bersihnya turun menjadi Rp 183,56 miliar pada tahun 2016 dan 2017. Menurut detikFinance, (2018) (diakses pada 20 April 2024), total pendapatan provinsi dan komisi dari pendapatan kartu kredit adalah Rp 317,88 miliar. Meskipun demikian, sebelum perbaikan, ada pendanaan sebesar Rp 1,06 triliun.

Pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin (BSB) juga mengalami perubahan, terutama dengan meningkatkan cadangan kerugian untuk debitur tertentu. Akibatnya, beban perusahaan meningkat sebesar Rp 148,6 miliar karena penurunan nilai aset keuangan dari Rp 649,05 miliar menjadi Rp 797,65 miliar dalam cadangan kerugian. Hal ini menunjukkan penurunan kualitas audit, yang menimbulkan keraguan bagi investor dan masyarakat secara keseluruhan. Pemegang saham, pemerintah, dan pihak terkait lainnya masih mengutamakan kualitas auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh (Baskaran et al., 2020) bertujuan untuk memperjelas hubungan antara orientasi etis dan fenomena persepsi manajemen laba dalam organisasi. Ini membahas sejauh mana manajemen laba dianggap sebagai adaptasi strategis atau manipulasi yang disengaja dalam suatu organisasi. Studi ini



ujuan untuk memperluas domain perspektif etika manajemen laba denganimbangan mediasi dan memoderasi peran sentimen investor dan tanggung sial perusahaan (CSR) sebagai tekanan ke dalam dan komitmen ke luar di

sekitar organisasi, mengadopsi perspektif gabungan manajemen strategis dan juga disiplin akuntansi daripada yang biasanya ditemukan dalam etika dan literatur manajemen laba.

Di Indonesia, pengaturan dan pengawasan praktik manajemen laba pada industri perbankan, baik syariah maupun konvensional, diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi OJK dirancang untuk membedakan secara jelas antara prinsip syariah dan konvensional dalam operasional perbankan, sekaligus memastikan bahwa masing-masing sistem beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan yang telah ditetapkan. Peraturan perbankan konvensional mencakup ketentuan mengenai praktik akuntansi, pelaporan keuangan, dan pengendalian bank.

Berdasar pada penelitian terdahulu ditemukan bahwa manajemen laba pada perusahaan konvensional seperti bank konvensional dipengaruhi oleh komite audit, ukuran perusahaan, dan kemampulabaan. Keberadaan OJK dengan instrumen yang dikembangkan seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjadi pedoman dan prinsip yang harus diikuti perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. SAK berperan penting dalam menjaga integritas dan transparansi informasi keuangan dengan memasukkan prinsip-prinsip yang dapat membatasi atau memantau praktik manajemen laba. Selain itu, OJK juga telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan indikator transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kesetaraan hak pemegang saham.



enerapan GCG dapat mengurangi risiko praktik pengelolaan pendapatan k etis. Namun variabel-variabel yang berpengaruh terhadap manajemen laba nteks perbankan konvensional belum tentu secara linier juga berpengaruh

terhadap perbankan syariah sebagaimana yang dijelaskan pada penelitian yang dilakukan (Nugraha et al., 2018). Penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan dalam praktik manajemen laba antara bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi praktik manajemen laba di perbankan syariah berbeda secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Penelitian (Hamdi & Zarai, 2013) yang memeriksa apakah eksekutif lembaga perbankan Islam (IBI) lebih cenderung menggunakan manajemen laba yang efisien (EM) atau EM oportunistik. Dalam penelitian ini, 81 bank syariah telah disampelkan selama periode keuangan 10 tahun, dari tahun 2000 hingga 2009. Metode regresi efek tetap digunakan. Menurut penelitian, proksi EM memiliki hubungan positif dan signifikan dengan profitabilitas masa depan. Ini menunjukkan bahwa proksi EM cenderung menjadi efisien. Ini menunjukkan bahwa manajemen bank syariah tidak menggunakan kebijaksanaannya untuk mengambil keuntungan pribadi. Namun, lebih bijaksana untuk memberi tahu orang dalam tentang profitabilitas IBI. Studi ini juga menunjukkan bahwa standar etika Islam dapat mempengaruhi kemungkinan EM oportunistik yang tidak etis. Perilaku manajemen seperti itu dilarang oleh etika Islam karena melanggar prinsip-prinsip etika Islam.

Penelitian lain yang menganalisis tentang faktor berpengaruh terhadap manajemen laba seperti yang dilakukan oleh (Ghaemi Asl & Ghasemi Doudkanlou, arif et al., 2022a). Penelitian (Ghaemi Asl & Ghasemi Doudkanlou, 2022) akan bahwa model Kasznik (1999) adalah model yang disukai dan kompatibel perilaku aktual sistem perbankan Islam Iran karena konsistensi koefisien



pengukuran dengan temuan teoritis dan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, total akrual, termasuk akrual diskresioner dan akrual non-diskresioner, paling banyak berhubungan dengan (1) properti, mesin dan peralatan; (2) perubahan arus kas dari aktivitas operasi; dan (3) selisih perubahan pendapatan (ΔREV) dan perubahan pendapatan akun piutang bersih (ΔREC).

Penelitian terkait dengan praktik manajemen laba di perbankan syariah juga telah dilakukan oleh (Abdelsalam et al., 2016). Penelitian tersebut menyelidiki dampak religiusitas organisasi terhadap kualitas pendapatan bank-bank yang terdaftar di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. (Abdelsalam et al., 2016) menganalisis lembaga perbankan Islam, yang beroperasi dalam norma-norma agama yang ketat dan memperluas batasan akuntabilitas, dan membandingkannya dengan perbankan konvensional selama 2008-2013. Ditemukan bahwa bank-bank Islam cenderung tidak mengelola pendapatan dan mengadopsi kebijakan akuntansi yang lebih konservatif. Berdasarkan temuan ini, dapat dikatakan bahwa norma-norma agama dan kendala akuntabilitas moral dalam organisasi-organisasi ini memiliki dampak signifikan pada kualitas pelaporan keuangan dan biaya agensi, yang memiliki implikasi bagi regulator dan pelaku pasar.

Seiring dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan internal dan eksternal organisasi, penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia belum menemukan kesepakatan. Selain



yang secara khusus menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba di perbankan syariah, terutama di Indonesia, masih terbatas, memberikan peluang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dalam konteks

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh struktur kepemilikan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) terhadap praktik manajemen laba pada perbankan syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang dan fenomena terkait manajemen laba, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh:

1. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia
2. Pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia

1.4 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan teoritis



Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk implementasi teori terkait dengan manajemen laba seperti *agency theory*, *information theory* ataupun *stewardship theory*.

1.4.2 Kegunaan praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini adalah menjadi salah satu referensi bagi calon investor yang akan memilih perbankan berbasis syariah sebagai alokasi investasi.

1.4.3 Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN: Bagian ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Bagian ini berisi Tinjauan Teoritis dan Konsep dan Tinjauan Empirik.
3. BAB III KERANGKA KONSEPTUAL: Bagian ini berisi Kerangka Konseptual/Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis.
4. BAB IV METODE PENELITIAN: Bagian ini berisi Jenis dan Rancangan Penelitian, Tempat dan Waktu, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Sampling, Teknik Pengumpulan Data, Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Teknik Analisis Data, Uji Hipotesis.
5. BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Bagian ini berisi Gambaran Umum dari Objek Penelitian, Deskripsi Variabel Penelitian, Hasil Uji Asumsi Klasik, Hasil Analisis Regresi Berganda, Hasil Uji Hipotesis T, dan Pembahasan.
6. BAB VI PENUTUP: Bagian ini berisi Kesimpulan, Saran, serta Keterbatasan Penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori keagenan

Teori agensi adalah kerangka konseptual yang signifikan dalam bidang studi manajemen, khususnya untuk memahami dinamika hubungan antara pemilik saham sebagai pemberi amanah dan manajer sebagai pihak yang menjalankan operasional perusahaan. Teori ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana asimetri informasi dan konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajer sebagai agen yang mengelolanya dapat mempengaruhi perilaku dan hasil perusahaan (Nguyen et al., 2022).

Sebuah perusahaan, sebagai entitas hukum yang terpisah, dioperasikan oleh manajer yang bertindak atas nama pemiliknya, yaitu pemegang saham. Namun, terdapat perbedaan kepentingan antara kedua pihak ini. Pemegang saham menginginkan pertumbuhan nilai perusahaan dan dividen yang maksimal, sedangkan manajer mungkin memiliki motivasi yang berbeda, seperti memaksimalkan gaji dan keamanan pekerjaan mereka. Inilah yang disebut dengan konflik keagenan, yaitu konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer).



onflik keagenan terjadi karena adanya asimetri informasi di antara kedua emegang saham tidak selalu memiliki informasi yang lengkap tentang

aktivitas operasional perusahaan, sedangkan manajer memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi tersebut.



Hal ini menciptakan peluang bagi manajer untuk bertindak sesuai kepentingan pribadi yang mungkin bertentangan dengan kepentingan pemegang saham (Davis et al., 2021).

Untuk mengatasi konflik keagenan ini, teori agensi menyediakan beberapa solusi atau mekanisme pengendalian. Salah satu mekanisme pengendalian utama adalah peran dewan direksi. Dewan direksi bertindak sebagai perwakilan pemegang saham dan bertugas mengawasi tindakan manajer serta mengambil keputusan strategis untuk kepentingan jangka panjang perusahaan. Namun, efektivitas dewan direksi tergantung pada independensinya, yaitu kemampuannya untuk bertindak secara mandiri tanpa pengaruh dari manajer.

Selain dewan direksi, insentif berbasis kinerja juga merupakan mekanisme penting dalam mengelola konflik keagenan. Bonus eksekutif, opsi saham, dan paket kompensasi lainnya dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mendorong manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, yaitu dengan meningkatkan kinerja perusahaan.

Namun, mekanisme pengendalian ini juga memiliki keterbatasan. Misalnya, dewan direksi yang tidak independen atau insentif berbasis kinerja yang tidak seimbang dapat mengurangi efektivitasnya dalam mengendalikan perilaku manajer. Selain itu, pemegang saham minoritas mungkin memiliki keterbatasan dalam mempengaruhi keputusan perusahaan jika pemegang saham mayoritas atau manajer

kendali yang kuat atas perusahaan.



Selain mekanisme internal, teori agensi juga mengidentifikasi peran pasar modal dan analisis keuangan sebagai mekanisme eksternal yang penting dalam mengurangi konflik keagenan. Investor dapat menggunakan informasi yang tersedia di pasar modal untuk memantau kinerja perusahaan dan memberikan tekanan kepada manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Dalam praktiknya, pengelolaan konflik keagenan merupakan tantangan yang kompleks dan terus-menerus bagi manajemen perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan mekanisme internal dan eksternal yang tepat untuk mengelola konflik keagenan secara efektif dan memastikan bahwa tindakan manajer selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan kepentingan pemegang saham.

Teori agensi dalam perbankan syariah berfokus pada hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer atau pengelola bank (agen). Ini berfokus pada upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memastikan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Karena asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, perbankan syariah juga mengalami konflik keagenan, seperti yang terjadi dalam perbankan konvensional. (Sari et al., 2021).

Bank syariah memiliki ciri khas yang membedakannya dari bank konvensional, yaitu beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang praktik riba (pemberian bunga), spekulasi, dan aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kepatuhan prinsip-prinsip ini menjadi prioritas utama baik bagi pemilik saham maupun bank. Namun, tantangan utama adalah memastikan manajer bank mampu



menjalankan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sambil memaksimalkan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

Konflik keagenan dalam perbankan syariah dapat muncul dalam beberapa bentuk, salah satunya adalah penyalahgunaan kepercayaan (*misappropriation*). Hal ini terjadi ketika manajer menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi atau melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah tanpa sepengetahuan pemegang saham. Asimetri informasi juga menjadi masalah, di mana pemegang saham mungkin tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi operasional bank untuk memonitor kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Muhibuddin et al., 2023).

Untuk mengatasi konflik keagenan ini, perbankan syariah menerapkan beberapa mekanisme pengendalian internal dan eksternal. Salah satunya adalah pengawasan dewan direksi. Dalam perbankan syariah, dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan serta aktivitas operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, mereka juga bertugas memantau kinerja manajemen dalam upaya mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Menurut (Sunarsih & Firmansyah, 2018) insentif berbasis syariah juga merupakan mekanisme pengendalian penting dalam perbankan syariah. Bonus dan kompensasi manajerial dapat dirancang sedemikian rupa sehingga terkait dengan an target kepatuhan syariah dan kinerja keuangan yang sehat. Ini akan ng manajer untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan



memastikan bahwa keputusan mereka menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan dan pemegang saham.

Selain mekanisme internal, perbankan syariah juga bergantung pada mekanisme eksternal untuk mengelola konflik keagenan. Salah satu mekanisme eksternal yang penting adalah lembaga pengawas atau regulator syariah, seperti Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK Syariah) di Indonesia. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan mengawasi kegiatan perbankan syariah untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah dan melindungi masyarakat dan kepentingan nasabah.

2.1.2 Teori asimetri informasi

Asimetri informasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu transaksi memiliki akses yang lebih baik atau lebih lengkap terhadap informasi dibandingkan dengan pihak lain. Pihak yang memiliki informasi lebih banyak ini disebut sebagai pihak yang berada dalam posisi informasi yang lebih baik, sementara pihak lainnya disebut sebagai pihak yang berada dalam posisi informasi yang lebih buruk atau kurang.

Dalam konteks ekonomi, asimetri informasi dapat terjadi dalam berbagai situasi. Salah satu contoh yang paling umum adalah dalam transaksi jual-beli barang atau jasa. Misalnya, penjual mungkin memiliki informasi lebih lengkap tentang kualitas atau kondisi barang yang dijual daripada pembeli. Hal ini dapat mengarah pada

membuat keputusan yang kurang optimal karena mereka tidak memiliki yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat (Eva Hotnaidah Saragih,



Selain itu, asimetri informasi juga sering terjadi dalam hubungan antara konsumen dan produsen, khususnya dalam hal kualitas, keamanan, atau efek samping dari produk atau layanan tertentu. Produsen mungkin memiliki informasi lebih banyak tentang produk mereka daripada konsumen, yang dapat menyebabkan konsumen mengalami kesulitan dalam membuat pilihan yang tepat.

Dalam konteks keuangan, asimetri informasi sangat relevan dalam hubungan antara investor dan perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi. Misalnya, manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih baik tentang prospek bisnis, kinerja keuangan, atau risiko yang dihadapi perusahaan daripada investor. Hal ini dapat menyebabkan investor membuat keputusan investasi yang kurang optimal karena mereka tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan.

Teori asimetri informasi juga memiliki implikasi yang penting dalam pasar keuangan. Salah satu aspeknya adalah pasar efisien, di mana harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia secara publik. Namun, dalam situasi di mana terdapat asimetri informasi, pasar mungkin tidak efisien karena harga tidak mencerminkan semua informasi yang tersedia atau karena pihak dengan informasi lebih banyak dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Salah satu konsep terkait dalam teori asimetri informasi adalah *lemons problem*, yang pertama kali dijelaskan oleh George Akerlof dalam makalahnya yang tentang pasar mobil bekas. Dalam kasus ini, pembeli mungkin ragu-ragu membeli barang yang digunakan karena mereka tidak dapat membedakan barang yang berkualitas baik (non-lemons) dan barang yang berkualitas buruk



(lemons). Akibatnya, harga barang tersebut dapat turun, menyebabkan penurunan kualitas produk yang ditawarkan di pasar secara keseluruhan.

Salah satu cara untuk mengatasi asimetri informasi adalah melalui transparansi dan pengungkapan informasi yang lebih baik. Dalam konteks pasar keuangan, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang relevan kepada investor melalui laporan keuangan dan pengumuman publik lainnya. Ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan investor dalam membuat keputusan investasi.

Namun, meskipun upaya telah dilakukan untuk mengurangi asimetri informasi, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan fenomena ini. Dalam analisis ekonomi dan keuangan, penting untuk terus mempertimbangkan asimetri informasi, serta untuk mengembangkan mekanisme pengendalian yang efisien untuk menguranginya. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan akses, kepentingan pribadi dari pihak yang terlibat, atau sifat rahasia dari beberapa informasi.

Teori asimetri informasi dalam konteks perbankan syariah mengacu pada ketidakseimbangan informasi antara bank sebagai pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap informasi tentang produk, layanan, dan transaksi yang dilakukan, dan nasabah atau pemegang rekening yang mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas tentang operasi bank syariah. Asimetri informasi ini dapat memengaruhi transparansi, kepercayaan, dan efisiensi pasar keuangan syariah (Nugraheni & Alimin, 2022).



alam konteks perbankan syariah, ketimpangan informasi dapat muncul berbagai situasi. Sebagai contoh, nasabah sering kali kurang memahami

prinsip-prinsip syariah serta penerapannya dalam produk dan layanan bank syariah. Kurangnya pemahaman ini dapat menimbulkan rasa khawatir dan ketidakpastian di kalangan nasabah ketika mereka harus membuat keputusan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, asimetri informasi juga dapat terjadi dalam hubungan antara bank syariah dan investor atau pemilik saham. Manajemen bank syariah mungkin memiliki informasi yang lebih baik tentang kinerja keuangan, risiko, atau strategi bisnis bank daripada investor. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat.

Dalam konteks pembiayaan syariah, asimetri informasi juga dapat memengaruhi hubungan antara bank syariah dan peminjam. Misalnya, peminjam mungkin tidak memiliki informasi yang cukup tentang persyaratan dan kondisi pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh bank, atau tentang implikasi jangka panjang dari kesepakatan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan dalam melakukan transaksi (Alias Candra, 2016).

Upaya telah dilakukan untuk mengurangi asimetri informasi dalam perbankan syariah. Salah satu cara untuk mengatasi asimetri informasi adalah dengan meningkatkan transparansi dan pengungkapan informasi. Bank syariah dapat meningkatkan pengungkapan informasi kepada nasabah dan investor tentang prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam produk dan layanan mereka, serta tentang



keuangan dan operasional bank secara keseluruhan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan keyakinan nasabah dan investor dalam hubungan bank syariah.

Selain itu, mekanisme pengendalian internal seperti peran dewan direksi juga dapat membantu mengurangi asimetri informasi dalam perbankan syariah. Dewan direksi bertanggung jawab untuk mengawasi operasi bank, termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan pengambilan keputusan strategis. Dengan memiliki dewan direksi yang independen dan berkualitas tinggi, bank syariah dapat memastikan bahwa informasi yang relevan disampaikan dengan jelas kepada pemangku kepentingan dan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Regulasi pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam mengurangi asimetri informasi dalam perbankan syariah. Badan pengawas atau regulator syariah dapat menetapkan standar pelaporan yang ketat dan mendorong bank syariah untuk meningkatkan transparansi dan pengungkapan informasi kepada nasabah dan investor. Selain itu, regulasi juga dapat memperkuat perlindungan konsumen dan investor dalam transaksi perbankan syariah.

Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengurangi asimetri informasi dalam perbankan syariah, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan akses informasi atau pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah oleh nasabah, investor, atau pihak lain yang terlibat dalam industri perbankan syariah. Oleh karena itu, untuk menjamin efisiensi, kepercayaan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam perbankan syariah, penting untuk terus meningkatkan

insi, pengungkapan, dan mekanisme pengendalian.



2.1.3 Teori *stewardship*

Teori *stewardship* adalah kerangka konseptual dalam studi manajemen yang menekankan pada kepercayaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab manajemen terhadap kepentingan pemegang saham dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Berbeda dengan teori agensi yang menekankan pada konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer, teori *stewardship* menganggap bahwa manajer memiliki motivasi untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham karena mereka merasa sebagai wakil atau pengelola yang bertanggung jawab atas kekayaan perusahaan (Pratono et al., 2023).

Teori *stewardship* menyoroti bahwa manajer dalam suatu perusahaan memiliki peran yang lebih dari sekadar agen yang menjalankan perintah dari pemilik atau pemegang saham. Manajer dianggap sebagai wakil yang dipercaya untuk mengelola kekayaan perusahaan dengan kebijaksanaan dan integritas, dengan fokus pada pencapaian tujuan jangka panjang yang menguntungkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat secara luas .

Pendekatan *stewardship* ini didasarkan pada asumsi bahwa manajer memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak demi kepentingan perusahaan dan tidak hanya untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka sendiri. Mereka percaya bahwa manajer memiliki rasa tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga keberlanjutan perusahaan dan mencapai tujuan jangka panjang yang memberikan nilai tambah bagi



semangku kepentingan (Le & Behl, 2022).

alam teori *stewardship*, hubungan antara manajer dan pemegang saham an pada kepercayaan, penghargaan, dan kolaborasi. Karena kepentingan

jangka panjang dalam kesuksesan perusahaan yang mereka pimpin, manajer dianggap memiliki kepentingan yang sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, mereka cenderung untuk mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan secara keseluruhan dan meminimalkan risiko yang tidak perlu.

Konsep utama dalam teori *stewardship* adalah hubungan antara manajer dan pemegang saham yang didasarkan pada kepercayaan dan akuntabilitas. Manajer dianggap sebagai "*steward*" atau pengelola yang dipercaya untuk menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan dengan mengelola sumber daya dengan efisien dan efektif. Manajer memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan yang jujur dan akurat kepada pemegang saham dan untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan (Wei et al., 2021).

Sebagai bagian dari konsep *stewardship*, terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan untuk perilaku manajer. 1). Manajer diharapkan untuk mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham daripada keuntungan jangka pendek yang mungkin merugikan perusahaan di masa depan. 2). Manajer diharapkan untuk memberikan laporan yang jujur dan akurat kepada pemegang saham, serta untuk berkomunikasi secara terbuka tentang kinerja perusahaan dan strategi yang dijalankan. 3). Manajer diharapkan untuk menghindari konflik kepentingan dan untuk menjauhi tindakan yang dapat merugikan perusahaan demi keuntungan pribadi atau kelompok kecil. 4). Manajer diharapkan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan serta menerima sanksi dari hasil kinerjanya. 5). Manajer diharapkan untuk menjadi pemimpin



yang efektif yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan bersama.

Artinya teori *stewardship* menekankan bahwa manajer yang efektif adalah mereka yang memiliki komitmen terhadap kepentingan jangka panjang perusahaan dan kemampuan untuk mengelola risiko dengan bijaksana. Mereka diberi otonomi dan kepercayaan untuk membuat keputusan yang tepat demi keberhasilan perusahaan, dan mereka diharapkan untuk menggunakan kebijaksanaan dan etika dalam melaksanakan tugas yang diemban.

Teori *stewardship* dalam konteks perbankan syariah menyoroti pentingnya kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab manajer bank terhadap pemegang saham, nasabah, dan masyarakat dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perbankan syariah, manajer bank dianggap sebagai "steward" atau pengelola yang bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional dan keputusan yang diambil.

Konsep utama dalam teori *stewardship* pada perbankan syariah adalah integritas, transparansi, dan akuntabilitas (Yulianto et al., 2023). Manajer bank diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan kejujuran dan keberanian, serta untuk memberikan laporan yang jujur dan akurat kepada pemegang saham dan



Mereka harus mengutamakan kepentingan jangka panjang perusahaan dan memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan.

Dalam perbankan syariah, hubungan antara manajer bank dan pemegang saham didasarkan pada kepercayaan dan kemitraan. Manajer bank dianggap sebagai perpanjangan dari pemegang saham dalam mengelola kekayaan perusahaan, dan mereka memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk melakukannya dengan integritas dan kejujuran. Oleh karena itu, manajer bank cenderung untuk mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan secara keseluruhan dan meminimalkan risiko yang tidak perlu, sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mendasari operasi perbankan syariah (Syarif et al., 2022b).

Aspek kunci dari teori stewardship dalam perbankan syariah adalah prinsip-prinsip syariah yang menjadi panduan dalam semua aspek operasional bank. Manajer bank diharapkan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam semua keputusan dan tindakan mereka, mulai dari struktur produk dan layanan hingga praktik pengelolaan risiko dan kebijakan keuangan. Hal ini memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan.

Selain itu, mekanisme pengendalian internal dan eksternal juga mendukung penerapan teori stewardship dalam perbankan syariah. Dewan direksi bank bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan operasional dan memastikan manajemen menjalankan operasi mereka dengan integritas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, regulator dan badan pengawas bertanggung jawab untuk



kan bahwa bank mematuhi standar syariah dan beroperasi dengan integritas paransi.

Meskipun teori *stewardship* menekankan pada tanggung jawab dan integritas manajer bank dalam mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetap ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah risiko konflik kepentingan yang mungkin timbul antara kepentingan bank dan kepentingan pribadi manajer atau pihak terkait. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme pengendalian yang kuat dan transparansi yang tinggi untuk meminimalkan risiko tersebut dan memastikan bahwa bank beroperasi dengan integritas dan keadilan dalam semua aspek operasionalnya.

2.2 Tinjauan empirik

Berikut adalah beberapa studi sebelumnya yang telah dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia, yaitu:

1. IHZA (2020) meneliti pengaruh tata kelola perusahaan berbasis syariah terhadap manajemen laba dengan leverage sebagai variabel mediasi pada perbankan syariah selama periode 2015-2019. Penelitian ini menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki hubungan negatif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. Sebaliknya, ukuran dewan komisaris menunjukkan hubungan negatif yang signifikan, sementara ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan. Selain itu, ukuran komite audit dan dewan pengawas syariah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.



penelitian Agustin & Filianti (2021) dalam hal pengaruh *corporate nance* dan kinerja keuangan terhadap manajemen laba perbankan syariah,

ukuran dewan pengawas syariah, proporsi dewan komisaris independen, ukuran bank, dan profitabilitas memengaruhi manajemen laba.

3. Bahri & Arrosyid (2021) yang dimana melakukan penelitian mengenai struktur kepemilikan, *good corporate governance*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba, menunjukkan tidak adanya pengaruh dari struktur kepemilikan, *good corporate governance*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.
4. Tuffahati, (2021) melakukan penelitian tentang bagaimana dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit mempengaruhi manajemen laba perbankan syariah; dengan hasil dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi manajemen laba, dewan komisaris serta komite audit mempengaruhi manajemen laba.
5. Penelitian yang dilakukan Hendi & Erika (2022) ini menelaah faktor-faktor yang memengaruhi manajemen laba dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, menggunakan data dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel seperti kepemilikan institusional (X1), kepemilikan manajerial (X2), proporsi dewan komisaris independen (X3), komite audit (X4), dewan direksi (X5), dewan independen (X6), kualitas audit (X7), *leverage* (X8), dan profitabilitas (X9) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap manajemen laba.

6. Sirota (2022) melakukan studi tentang pengaruh *good corporate governance* dap manajemen laba pada perbankan syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa n direksi tidak mempengaruhi manajemen laba pada perbankan syariah,



hasil dewan komisaris mempengaruhi manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia, hasil dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia, dan hasil komite audit tidak mempengaruhi manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia, serta komite manajemen resiko tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba perbankan syariah di Indonesia.

7. Penelitian yang dilakukan Ahlyah (2022) mengenai *good corporate governance* yang dilakukan pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK dari tahun 2013 hingga 2020, ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi manajemen laba, komisaris independen mempengaruhi manajemen laba, dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi manajemen laba, komite audit tidak mempengaruhi manajemen laba, dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi manajemen laba.
8. Penelitian yang dilakukan Koesworo (2022) mengenai bagaimana kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berdampak pada manajemen laba perbankan syariah pada periode 2017–2020, hasil kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan pada manajemen laba perbankan syariah, sedangkan hasil kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif dan signifikan.
9. Hasil penelitian Hidayah Pulungan & Nasution (2023) mengenai dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit mempengaruhi manajemen laba perbankan syariah, menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah dan dewan komisaris tidak mempengaruhi manajemen laba perbankan syariah. Komite audit tidak mempengaruhi manajemen laba perbankan syariah.



10. Penelitian yang dilakukan Puspitasari et al., (2023) mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap kualitas audit: manajemen laba, dengan hasil struktur kepemilikan dan kualitas audit dapat mengurangi manajemen laba.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Imaniar Agustin dan Dian Filianti	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba Perbankan Syariah	dalam hal pengaruh corporate governance dan kinerja keuangan terhadap manajemen laba perbankan syariah, ukuran dewan pengawas syariah, proporsi dewan komisaris independen, ukuran bank, dan profitabilitas mempengaruhi manajemen laba.
2	Hendi dan Erika	Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI)	Hasilnya menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional (X1), kepemilikan manajerial (X2), proporsi dewan komisaris independen (X3), komite audit (X4), dewan direktur (X5), dewan



No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			independen (X6), kualitas audit (X7), leverage (X8), dan profitabilitas (X9) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba.
3	Khusnus Sirota	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah	Hasilnya menunjukkan bahwa dewan direksi tidak mempengaruhi manajemen laba pada perbankan syariah, hasil dewan komisaris mempengaruhi manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia, hasil dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi manajemen laba pada perbankan syariah di Indonesia, dan hasil komite audit tidak mempengaruhi manajemen laba pada perbankan syariah di



No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			Indonesia, serta komite manajemen resiko tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba perbankan syariah di Indonesia.
4	An Nisa' Sakinatul Ahliyah	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2013-2020)	ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi manajemen laba, komisaris independen mempengaruhi manajemen laba, dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi manajemen laba, komite audit tidak mempengaruhi manajemen laba, dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi manajemen laba.
5	Muhammad Aulia Ihza	Analisis Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba Dengan <i>Leverage</i>	Proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif namun



No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Sebagai Variabel Intervening Di Industri Perbankan Syariah Periode 2015-2019	tidak signifikan terhadap manajemen laba, ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, ukuran komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba melalui variabel <i>leverage</i> , ukuran dewan komisaris berpengaruh tidak



No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>signifikan terhadap manajemen laba melalui variabel <i>leverage</i>, ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba melalui variabel <i>leverage</i>, ukuran komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba melalui variabel <i>leverage</i>, ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba melalui variabel <i>leverage</i></p>
6	Naufal Aditya Koesworo	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba Perbankan Syariah	hasil kepemilikan institusional dan manajerial berpengaruh positif dan signifikan pada manajemen laba perbankan syariah, sedangkan hasil



No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif dan signifikan.
7	Nur Hidayah Pulungan dan Juliana Nasution	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah	menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah dan dewan komisaris tidak mempengaruhi manajemen laba perbankan syariah. Komite audit juga tidak mempengaruhi manajemen laba perbankan syariah.
8	Syaiful Basri dan Yohanna Putri Arrosyid	Struktur Kepemilikan, <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	menunjukkan tidak adanya pengaruh dari struktur kepemilikan, <i>good corporate governance</i> , <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.
9	Yuni Amida Puspitasari, Zoyya Zulfa, Ulin Nuha, dan Amelia Wulan Sefiani	Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kualitas Audit: Manajemen Laba	dengan hasil struktur kepemilikan dan kualitas audit dapat mengurangi manajemen laba.



No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
10	Dunyaa Nida' Tuffahati	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah	dengan hasil dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi manajemen laba, dewan komisaris serta komite audit mempengaruhi manajemen laba.

